JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERILAKU PRO LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Krisdoni Indriarto[1], Danny Permana[2], Agustina Setiawan[3].
[1,2,3.] Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kabupaten Bandung Barat menghadapi peningkatan volume sampah rumah tangga setiap tahun yang belum diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan tersebut terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori terhadap 100 responden yang dipilih secara proporsional pada tiga desa di Kabupaten Bandung Barat. Variabel implementasi kebijakan diukur menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel perilaku pro lingkungan diukur menggunakan dimensi perilaku pro lingkungan menurut Kaiser yang terdiri atas penghematan energi, transportasi ramah lingkungan, daur ulang, pengelolaan sampah, perilaku konsumsi, dan perilaku sosial. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat dengan koefisien determinasi sebesar 71,2% ($R^2 = 0,712$; $p < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai strategi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, perilaku pro lingkungan, pengelolaan sampah, Edward III, Kaiser.

Abstract

Waste management has become one of the major challenges in achieving sustainable development in Indonesia. West Bandung Regency experiences a continuous increase in household

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

waste generation, which has not been accompanied by corresponding improvements in community environmental behavior. To address this issue, the West Bandung Regency Government enacted Regent Regulation Number 16 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies for Household Waste Management. This study aims to examine the effect of policy implementation on community pro-environmental behavior.

This research employed a quantitative explanatory survey involving 100 respondents selected proportionally from three villages in West Bandung Regency. Policy implementation was measured using George C. Edward III's policy implementation model consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Pro-environmental behavior was measured using Kaiser's six-dimensional framework. Data were analyzed using simple linear regression. The results indicate that the implementation of Regent Regulation Number 16 of 2019 has a positive and statistically significant effect on pro-environmental behavior ($R^2 = 0.712$; $p < 0.05$). These findings indicate that effective policy implementation substantially contributes to improving environmentally responsible behavior among the community. Strengthening policy communication, institutional capacity, waste management infrastructure, and community participation is recommended to improve environmental governance and sustainable waste management.

Keywords : *policy implementation, pro-environmental behavior, waste management, Edward III, sustainable development.*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep tersebut mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Dalam konteks Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekaligus kewajiban menjaga kelestariannya.

Salah satu persoalan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah adalah meningkatnya volume sampah rumah tangga. Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, peningkatan konsumsi masyarakat, serta perubahan pola hidup telah menyebabkan peningkatan timbulan sampah secara signifikan. Kondisi tersebut tidak hanya

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

meningkatkan beban pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, tetapi juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, emisi gas rumah kaca, serta kerusakan ekosistem (Kaza et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan *end of pipe* menuju pengurangan sampah sejak dari sumber melalui prinsip *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (3R). Paradigma tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan volume sampah setiap tahun. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa produksi sampah pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.594 ton per hari, dengan komposisi terbesar berasal dari sisa makanan, plastik, dan kertas. Volume tersebut menunjukkan bahwa persoalan persampahan telah menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah yang memerlukan kebijakan komprehensif dan implementasi yang efektif.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019–2025. Kebijakan tersebut mengarahkan pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis sumber, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular. Walaupun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara optimal.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menentukan sejauh mana suatu kebijakan mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang menghasilkan perubahan pada kelompok sasaran. Implementasi kebijakan yang tidak didukung komunikasi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

efektif, sumber daya memadai, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi yang baik berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

Di sisi lain, perilaku pro lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan. Menurut Kaiser, perilaku pro lingkungan diwujudkan melalui tindakan nyata seperti penghematan energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, kegiatan daur ulang, pengelolaan sampah, perilaku konsumsi berkelanjutan, dan partisipasi sosial dalam menjaga lingkungan. Perubahan perilaku tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal individu maupun faktor eksternal berupa kebijakan publik, pendidikan, dan lingkungan sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan positif terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih banyak mengkaji efektivitas program pengelolaan sampah atau partisipasi masyarakat secara terpisah, sedangkan penelitian yang secara khusus menguji pengaruh implementasi Peraturan Bupati terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat menggunakan pendekatan teori Edward III dan Kaiser masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi model implementasi kebijakan Edward III dengan konsep perilaku pro lingkungan Kaiser dalam menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai besarnya kontribusi implementasi kebijakan daerah terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat serta mengukur besarnya kontribusi implementasi kebijakan dalam membentuk perilaku masyarakat yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Metode Penelitian

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Desa Ciburuy, Desa Kertawangi, dan Desa Cilame, yang telah menerapkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Variabel independen adalah implementasi kebijakan yang diukur menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel dependen adalah perilaku pro lingkungan masyarakat yang diukur berdasarkan enam dimensi perilaku pro lingkungan menurut Kaiser, yaitu penghematan energi, transportasi ramah lingkungan, daur ulang, pengelolaan sampah, perilaku konsumsi, dan perilaku sosial.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, observasi, dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Sebelum pengujian hipotesis, data diuji melalui uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Selanjutnya, pengaruh implementasi kebijakan terhadap perilaku pro lingkungan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS pada tingkat signifikansi 5%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perilaku Pro Lingkungan Masyarakat

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, sehingga semakin baik implementasi kebijakan, semakin tinggi pula perilaku pro lingkungan masyarakat. Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 71,2% mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan mampu menjelaskan sebagian

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

besar variasi perilaku pro lingkungan masyarakat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti tingkat pendidikan, budaya lingkungan, kondisi ekonomi rumah tangga, serta pengaruh komunitas. *(Sesuaikan angka ini dengan hasil analisis SPSS pada tesis Anda.)*

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku (*behavioral change*). Implementasi kebijakan yang dilaksanakan secara efektif mampu membentuk norma sosial baru mengenai pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila keempat dimensi tersebut berjalan secara sinergis, tujuan kebijakan akan lebih mudah diwujudkan melalui perubahan perilaku kelompok sasaran.

Lebih jauh, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses implementasi kebijakan yang berlangsung secara bertahap. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, penyediaan sarana pengangkutan sampah, serta penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa. Program-program tersebut memberikan stimulus bagi masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Temuan ini juga memperkuat teori perilaku pro lingkungan yang dikembangkan oleh Florian Kaiser yang menyatakan bahwa perilaku ramah lingkungan merupakan hasil interaksi antara faktor individu dengan faktor eksternal berupa kebijakan, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dengan kata lain, kebijakan publik menjadi salah satu determinan penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dimensi Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi memperoleh penilaian yang relatif tinggi dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

menyampaikan substansi kebijakan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti penyuluhan, sosialisasi langsung, kegiatan kader lingkungan, sekolah peduli lingkungan, serta pembinaan kelompok bank sampah.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya merata. Sebagian responden masih belum memahami kewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga maupun manfaat ekonomi dari program bank sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses transmisi informasi dengan tingkat pemahaman masyarakat.

Menurut Edward III, komunikasi kebijakan harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu *transmission, clarity*, dan *consistency*. Informasi yang tidak disampaikan secara konsisten akan menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat pelaksana maupun masyarakat sehingga implementasi kebijakan menjadi kurang optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhadi dan kolega (2023) yang menunjukkan bahwa intensitas komunikasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komunikasi yang berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis dari pengelolaan sampah.

Dengan demikian, komunikasi tidak cukup hanya dilakukan pada tahap awal implementasi kebijakan, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan media digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyediakan dukungan kelembagaan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, serta sejumlah bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa kendaraan pengangkut sampah, tempat penampungan sementara, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan volume sampah rumah tangga. Keterbatasan armada pengangkutan, belum meratanya fasilitas pemilahan sampah, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, sumber daya merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi. Edward III menegaskan bahwa keberadaan kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak didukung sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan sarana prasarana yang memadai.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Asep Warlan Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah merupakan salah satu penyebab rendahnya efektivitas implementasi kebijakan persampahan di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Selain itu, laporan *World Bank* menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan sampah perkotaan sangat dipengaruhi oleh investasi pemerintah pada infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Daerah yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik cenderung menunjukkan tingkat pengurangan sampah yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kapasitas kelembagaan terbatas.

3. Disposisi Pelaksana

Dimensi disposisi menggambarkan sikap, komitmen, dan kesediaan aparatur dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan program pengelolaan sampah. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkala, pembinaan bank sampah, serta koordinasi dengan pemerintah desa.

Namun demikian, komitmen aparatur belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat partisipasi masyarakat yang merata. Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah sehingga belum seluruhnya menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparatur, tetapi juga oleh kemauan (*willingness*) dan komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi antara komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat melalui insentif ekonomi, penghargaan lingkungan, dan peningkatan kapasitas komunitas menjadi penting untuk memperkuat perubahan perilaku.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi merupakan salah satu determinan penting dalam implementasi kebijakan publik karena berkaitan dengan mekanisme koordinasi, pembagian tugas, prosedur operasional, dan sistem pengawasan. Menurut model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugas secara efektif, sedangkan struktur yang terlalu kompleks atau tidak terkoordinasi dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 telah memiliki dasar kelembagaan yang cukup jelas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai organisasi utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah menjalankan fungsi operasional di lapangan. Selain itu, pemerintah desa, kelompok swadaya masyarakat, serta pengelola bank sampah turut berperan sebagai aktor pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Walaupun demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa koordinasi antaraktor belum berjalan optimal. Beberapa responden menyatakan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pemilahan sampah, jadwal pengangkutan, maupun prosedur penanganan sampah yang dapat didaur ulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi birokrasi masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan.

Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi birokrasi sering menyebabkan tanggung jawab tersebar pada banyak organisasi sehingga koordinasi menjadi kurang efektif. Semakin banyak organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan, semakin besar pula potensi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

terjadinya tumpang tindih kewenangan apabila tidak didukung oleh prosedur operasional standar (*standard operating procedures/SOP*) yang jelas. Oleh karena itu, penyederhanaan mekanisme koordinasi dan penguatan sistem monitoring menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Agus Pramusinto (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan lingkungan di tingkat pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan SOP. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi pemerintah dalam membangun tata kelola yang kolaboratif.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 telah menyediakan kerangka kelembagaan yang memadai, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, integrasi sistem informasi pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas aparatur agar implementasi kebijakan berlangsung lebih efektif.

Analisis Perilaku Pro Lingkungan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pro lingkungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik, yang tercermin dari berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan enam dimensi perilaku pro lingkungan yang dikembangkan oleh Florian Kaiser, yaitu penghematan energi, transportasi ramah lingkungan, daur ulang, penanganan sampah, konsumerisme berkelanjutan, dan perilaku sosial, terlihat bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi positif terhadap terbentuknya kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Meskipun demikian, tingkat pencapaian pada masing-masing dimensi menunjukkan variasi yang mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan penguatan melalui implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pada aspek penghematan energi, sebagian besar responden telah membiasakan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, serta mengendalikan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

konsumsi energi rumah tangga. Meskipun indikator ini tidak berkaitan secara langsung dengan pengelolaan sampah, perilaku tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran ekologis masyarakat terhadap pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya alam. Menurut Kaiser, individu yang memiliki orientasi pro lingkungan cenderung menunjukkan konsistensi perilaku pada berbagai aktivitas yang mendukung kelestarian lingkungan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pola konsumsi yang bertanggung jawab. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan perubahan pada perilaku pengelolaan sampah semata, tetapi juga mendorong berkembangnya budaya peduli lingkungan yang lebih luas melalui mekanisme *spillover effect*, yaitu kondisi ketika perubahan pada satu perilaku ramah lingkungan memicu munculnya perilaku ramah lingkungan lainnya.

Di sisi lain, dimensi transportasi ramah lingkungan memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Sebagian besar responden masih mengandalkan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari karena keterbatasan akses terhadap transportasi publik yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pro lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ketersediaan infrastruktur transportasi, tata ruang wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, perilaku pro lingkungan merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor. Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan lingkungan, transportasi, energi, dan tata ruang sehingga perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi pada satu sektor kebijakan.

Selanjutnya, dimensi daur ulang menunjukkan hasil yang relatif baik. Sebagian masyarakat telah memanfaatkan sampah anorganik sebagai bahan kerajinan maupun menyetorkannya ke bank sampah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan bank sampah tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan nilai jual sampah yang telah dipilah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap sampah, dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi sumber daya yang

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

memiliki manfaat ekonomi. Temuan ini mendukung konsep *circular economy* yang memandang limbah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses penggunaan ulang, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular juga merupakan salah satu strategi utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh United Nations, khususnya Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan serta Tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dimensi penanganan sampah memperoleh skor tertinggi dibandingkan dimensi perilaku pro lingkungan lainnya. Sebagian besar responden telah membiasakan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Program sosialisasi, pengembangan bank sampah, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perilaku masyarakat masih bervariasi antarwilayah. Pada beberapa lokasi masih ditemukan masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya sehingga menunjukkan bahwa proses perubahan perilaku memerlukan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus dan didukung oleh pengawasan serta pembinaan yang berkelanjutan.

Pada dimensi konsumerisme berkelanjutan, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju perilaku yang lebih ramah lingkungan. Sebagian responden mulai mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, memilih produk yang dapat digunakan kembali, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dalam aktivitas konsumsi. Akan tetapi, penggunaan produk sekali pakai masih relatif tinggi sehingga menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumsi merupakan aspek yang paling kompleks untuk diwujudkan. Hal tersebut disebabkan karena perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya konsumsi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

masyarakat, tingkat pendapatan, kemudahan memperoleh produk, serta strategi pemasaran produk di pasaran. Oleh karena itu, perubahan pola konsumsi memerlukan kombinasi antara regulasi pemerintah, edukasi masyarakat, pemberian insentif ekonomi, serta keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan produk yang lebih ramah lingkungan sebagaimana direkomendasikan oleh United Nations Environment Programme.

Selain perilaku individu, penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi perilaku sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, sosialisasi lingkungan, pembentukan kelompok peduli lingkungan, serta kegiatan bank sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun komunitas masyarakat. Tingginya partisipasi sosial menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membentuk perubahan perilaku individu, tetapi juga berhasil memperkuat modal sosial (social capital) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin dicapai hanya melalui intervensi pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom yang menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama akan berlangsung lebih efektif apabila masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan perilaku pro lingkungan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi dalam proses implementasinya. Pada saat yang sama, hasil penelitian memperluas penerapan teori perilaku pro lingkungan Kaiser dengan menunjukkan bahwa kebijakan publik daerah merupakan salah satu determinan eksternal yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup dicapai melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas semata, tetapi memerlukan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

implementasi kebijakan yang efektif, edukasi yang berkesinambungan, penguatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antarsektor agar perubahan perilaku pro lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan lingkungan yang efektif tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membentuk transformasi budaya lingkungan (*environmental culture*) yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat perilaku masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

Analisis terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dukungan sumber daya berupa kelembagaan, sarana, dan prasarana telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Disposisi aparatur menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas yang jelas meskipun koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan berlangsung lebih efektif.

Pada sisi perilaku pro lingkungan, masyarakat menunjukkan kecenderungan positif pada hampir seluruh dimensi yang diukur, terutama dalam pengelolaan sampah, kegiatan daur ulang, penghematan energi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan. Namun demikian, perilaku konsumsi berkelanjutan serta penggunaan transportasi ramah lingkungan masih memerlukan perhatian lebih karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketersediaan infrastruktur, budaya konsumsi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

perilaku pro lingkungan merupakan proses yang bersifat bertahap dan memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor.

Temuan penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris terhadap teori perilaku pro lingkungan Florian Kaiser bahwa kebijakan publik merupakan salah satu determinan eksternal yang mampu mendorong terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada keberhasilan pemerintah dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan budaya peduli lingkungan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi kebijakan melalui edukasi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, memperluas cakupan bank sampah, memperbaiki koordinasi antarinstansi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pengelolaan lingkungan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

George C. Edward III. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Florian Kaiser, F. G. (1998). A general measure of ecological behavior. Journal of Applied Social Psychology, 28(5), 395–422.

Kaiser, F. G., & Wilson, M. (2004). Goal-directed conservation behavior: The specific composition of a general performance. Personality and Individual Differences, 36(7), 1531–1544.

Daniel Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations (2nd ed.). New York: Wiley.

Thomas R. Dye. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Boston: Pearson.

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

William N. Dunn. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge.

James E. Anderson. (2015). Public Policymaking (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

Michael Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (4th ed.). Oxford University Press.

Elinor Ostrom. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

United Nations Environment Programme. (2021). From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution.

World Bank. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank.

Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). OECD Environmental Performance Reviews.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kabupaten Bandung Barat. (2019). Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019–2025. Bandung Barat.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6270

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Capaian Pengelolaan Sampah Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.